

BAB I

PENDAHULUAN

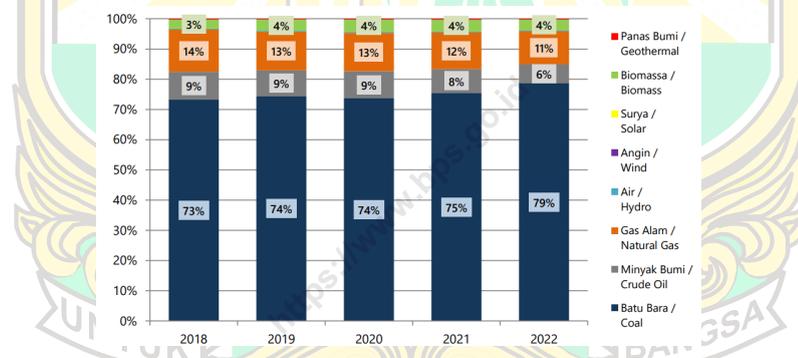
1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim telah menjadi permasalahan global yang krusial dan mendesak untuk ditangani. Berdasarkan CARE Climate Change dalam beberapa tahun terakhir, suhu global mencapai rekor tertinggi, ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata pada tahun 2015 dan 2016 disertai lonjakan konsentrasi CO₂ di atmosfer. Perubahan iklim global yang tidak terkendali memicu berbagai tantangan dan permasalahan, hingga dampak yang dirasakan oleh jutaan penduduk dunia seperti bencana kekeringan akibat fenomena El Nino, dan diperburuk oleh perubahan iklim hingga krisis ketahanan pangan.

The Intergovernmental Panel on Climate Change menunjukkan pada dasarnya, emisi gas rumah kaca bersumber dari aktivitas manusia terutama di sektor industri, semakin meningkatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Aktivitas operasional perusahaan, yang melibatkan proses produksi, transportasi, dan konsumsi energi, merupakan salah satu penyumbang utama terhadap fluktuasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Perusahaan, selaku pelaku ekonomi utama, berperan signifikan dalam menghasilkan emisi tersebut melalui penggunaan energi fosil, pembakaran bahan bakar, serta proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Meskipun sektor industri memiliki peran vital dalam perekonomian global, dampak negatif yang ditimbulkan menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan umat manusia. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah dampak pemanasan global tidak bersifat sementara, Pemanasan yang disebabkan oleh Gas Rumah Kaca (GRK) cenderung bertahan dalam waktu yang sangat lama, bahkan hingga beberapa dekade. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun manusia secara

drastis mengurangi emisi karbon hingga nol mulai hari ini, suhu bumi kemungkinan besar akan tetap mengalami peningkatan sebesar 1,5°C (Laine et al., 2022: IPCC, 2018).

Berdasarkan *World Resources Institute* (WRI), pada tahun 2014, terdapat enam negara yang merupakan penghasil emisi karbon terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, China, India, Eropa, Rusia dan Indonesia. China tercatat sebagai negara dengan dengan emisi karbon terbesar, mencapai 10,68 Mt CO₂e, sementara Amerika Serikat berada di posisi kedua sebagai negara penghasil emisi karbon dioksida sebesar 5,82 Mt CO₂e. Di posisi ketiga adalah Eropa dengan volume emisi karbon sebesar 4,12 Mt CO₂e. India menempati posisi keempat sebagai negara emisi karbon dioksida dengan jumlah 2,89 Mt CO₂e. Rusia berada di peringkat kelima dengan volume emisi karbon sebesar 2,25 Mt CO₂e, dan Indonesia berada pada urutan keenam sebagai negara penghasil emisi karbon dioksida dengan volume 2,05 miliar Mt CO₂e (Ummah & Setiawan, 2021).



Gambar 1.1 Kontribusi Input Energi Alam Indonesia

Sumber: BPS Indonesia 2024

Berdasarkan data dari laman Badan Pusat Statistik diatas bahwa sebagian besar tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara, minyak, dan gas alam akan terus menjadi penyedia utama energi dunia, hal ini didukung dengan laporan Global Carbon Project, 2022, bahwa bahan bakar fosil merupakan kontributor emisi terbesar pada angka 37,5 miliar ton CO₂. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa batubara

menyumbang 72-80 persen dari input energi alam sumber daya alam tidak dapat diperbaharui di Indonesia pada rentang waktu 2018-2022. Sumber daya dapat diperbaharui seperti panas bumi, angin dan surya menyumbang 11-14 persen dari input energi alam di Indonesia, Dari total input energi yang berasal dari sumber daya terbarukan, biomassa berperan pada angka 2 sampai 4 persen.

Mengingat urgensi dari permasalahan emisi gas rumah kaca, terdapat inisiasi tingkat global untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Tata Kelola global yang paling dikenal yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change*, kerangka konseptual yang menyusun dan mengarahkan pembicaraan internasional dalam menangani perubahan iklim. Tahun 1997, UNFCCC mengadopsi Protokol Kyoto yang menetapkan target penurunan emisi GRK yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Protokol ini diyakini sebagai salah satu tahapan awal menuju sistem perdagangan emisi internasional dan penciptaan pasar karbon. Sebagai wujud komitmen, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto dan menetapkan Undang-Undang No 17 2004 untuk mengurangi emisi GRK. Usaha pengurangan emisi karbon dapat diidentifikasi jika perusahaan melaporkan pengungkapan emisi karbon mereka kepada publik.

Menurut Irwhantoko & Basuki (2016) pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih sebatas inisiatif sukarela dan belum diterapkan secara luas oleh banyak entitas bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen terhadap transparansi lingkungan, khususnya terkait emisi karbon, masih rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya regulasi yang mengikat dan tidak adanya tekanan dari para pemangku kepentingan. Disamping itu pengungkapan emisi karbon dapat memberikan manfaat, seperti meningkatkan reputasi perusahaan, menarik perhatian investor, dan berkontribusi pada usaha dalam mengurangi dampak pemanasan global.

Penelitian ini termotivasi menginvestigasi faktor-faktor pendorong di balik praktik pengungkapan yang masih sukarela tersebut. Selain itu, studi ini mengenai topik ini di Indonesia masih terbatas dan hasilnya bervariasi, sehingga memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Puteri & Inawati (2023) bahwa *Environmental management system* dan *environmental performance* dengan *leverage* dan *firm age* sebagai variabel kontrol secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, namun, penelitian oleh Setiany et al., (2022) dengan variabel independen *Media Exposure* dan Ukuran perusahaan terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara Kepemilikan pemerintah, Leverage dan Profitability tidak menunjukkan adanya pengaruh yang berarti.

Pada tingkat global penelitian yang dilakukan baru baru ini oleh Singhanian & Bhan, (2024) bahwa kepemilikan pemerintah dan kepemilikan institusi memiliki pengaruh positif dalam pengungkapan emisi karbon. Serta penelitian oleh Acar et al., (2021) membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah yang tinggi berpengaruh pada pengungkapan lingkungan, namun kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif pada pengungkapan lingkungan. Kepemilikan pemerintah yang tinggi dan beroperasi di negara maju cenderung memiliki pengungkapan lingkungan yang semakin tinggi, namun bersifat relatif pada negara berkembang.

Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti **Pengaruh Sertifikasi Lingkungan Internasional dan *Government Power* terhadap Pengungkapan Emisi Karbon** dengan objek penelitian perusahaan energi yang teregistrasi sebagai emiten pada BEI pada rentang waktu 5 tahun yaitu 2019 hingga 2023. Sertifikasi lingkungan internasional merupakan standar yang diakui internasional yang dirancang pada sistem manajemen lingkungan, menunjukkan dorongan perusahaan dalam mengadopsi sistem manajemen

lingkungan yang terstruktur dan akuntabilitas pada lingkungan, kepemilikan sertifikasi ini tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap praktik operasional berkelanjutan, tetapi juga dapat dipandang sebagai strategi perusahaan dalam menjaga legitimasi pada publik, khususnya dalam merespon isu-isu lingkungan yang semakin menjadi atensi global. teori legitimasi berasumsi bahwa perusahaan berusaha mendapatkan legitimasi sosial melalui kesesuaian antara aktivitas organisasi dengan norma, nilai, dan ekspektasi masyarakat (Suchman, 1995). *Government Power* merupakan pengaruh kepemilikan pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan, sehingga pemerintah juga dapat mempengaruhi praktik pengungkapan lingkungan perusahaan (Lu & Abeysekera, 2014). Keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan perusahaan turut memberikan sinyal penting terhadap kebijakan perusahaan, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah seringkali berada dibawah pengawasan serta diharapkan menunjukkan sensitivitas terhadap agenda nasional dan komitmen internasional dalam isu perubahan iklim. Perspektif *Stakeholder* dalam hal ini berperan menjelaskan bagaimana tekanan dari eksternal, termasuk pemerintah dan masyarakat dapat mendorong perusahaan dalam tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pemilihan perusahaan energi sebagai objek dikarenakan sektor energi merupakan salah satu kontributor emisi karbon terbesar baik di tingkat global maupun di Indonesia. Keterbaruan pada studi ini terletak pada penggunaan *Global Reporting Initiative* (GRI) 305 sebagai pengukuran pengungkapan emisi karbon, serta mereplikasi studi Acar et al., (2021) untuk mengkaji apakah kepemilikan pemerintah yang tinggi dan beroperasi di negara berkembang menghasilkan temuan yang serupa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sertifikasi Lingkungan Internasional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan energi?
2. Apakah *Government Power* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan energi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Pengaruh Sertifikasi Lingkungan Internasional terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan energi.
2. Pengaruh *Government Power* terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan energi.

1.4 Batasan Kajian

1. Penelitian berfokus pada sertifikasi lingkungan internasional, dan *Government Power* untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan Industri Sektor Energi yang Terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di Sektor Energi yang teregistrasi di BEI.
3. Periode waktu penelitian adalah dari tahun 2019 hingga 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan ini bertujuan untuk dapat memperkaya wawasan dan literatur ilmiah tentang pengungkapan emisi karbon. Sehingga, capaian penelitian ini ditujukan dapat menjadi tambahan literatur untuk penelitian lebih lanjut di bidang serupa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan acuan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan strategis yang mendukung transparansi pengelolaan emisi karbon, yang tidak hanya memperkuat kepercayaan investor tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dalam mendorong perusahaan agar lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi lingkungan yang dihasilkan. Bagi masyarakat umum, penelitian ini juga turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keberlanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang setiap bab nya terdiri dari beberapa sub-bagian yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga akan didapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Kerangka penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab I menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, kerangka pemikiran hingga rumusan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, Teknik perolehan data, serta pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari alat analisis SPSS 26, disertai pembahasan yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya.

Bab V : Penutup

Bab ini menyajikan ringkasan berdasarkan hasil penelitian, implikasi penelitian, serta masukan konstruktif untuk penelitian selanjutnya.

